

## **Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap PDRB Dan Hubungannya dengan Kemiskinan di Kota Jambi**

**A. Ferry Risnu Murti\*; Syamsurijal Tan; Zulfanetti**

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*\*E-mail korespondensi: aferryrm93@gmail.com*

### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe the effect of PAD, DAU, DAK and Capital Expenditure on GRDP in Jambi City for the 2000-2020 period, either partially or simultaneously, as well as the relationship between GRDP and poverty in Jambi City for the 2000-2020 period. This study uses quantitative methods, where the data sources in this study are regional financial and asset management agency of Jambi City, regional revenue and retribution management agency of Jambi City, and Jambi City Statistical Center. The data obtained were then analyzed using quantitative analysis techniques in the form of multiple linear regression analysis and product moment correlation analysis. The results of the statistical t test prove that partially PAD and DAK have a significant effect on Jambi City's GRDP for the 2000-2020 period, while DAU and capital expenditures have no significant effect on Jambi City's GRDP for the 2000-2020 period. The results of the F test prove that simultaneously PAD, DAU, DAK and Capital Expenditures have a significant effect on Jambi City's GDP for the 2000-2020 period. The correlation test results show that GRDP has a significant relationship with poverty in Jambi City for the 2000-2020 period. Based on these findings, it is suggested that local governments can explore sources of Regional Original Income (PAD) either by intensification or extensification, as well as manage both DAU and DAK so that the increase in GRDP each period can be achieved optimally and on target.*

---

**Keyword:** PAD, DAU, DAK, capital expenditure, GRDP, poverty

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kota Jambi periode 2000-2020, baik secara parsial maupun secara simultan, serta hubungan PDRB terhadap kemiskinan di Kota Jambi periode 2000-2020. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah BPKAD, BPPRD, dan BPS Kota Jambi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif berupa analisis regresi linear berganda dan analisis korelasi product moment. Hasil uji t statistik membuktikan bahwa secara parsial PAD dan DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Jambi periode 2000-2020, sedangkan DAU dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB Kota Jambi periode 2000-2020. Hasil uji F membuktikan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Jambi periode 2000-2020 Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan yang signifikan dengan kemiskinan di Kota Jambi Periode 2000-2020. Berdasarkan hasil temuan ini disarankan pemerintah daerah bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, serta mengelola dengan baik DAU dan DAK agar peningkatan PDRB setiap periodenya bisa dicapai secara optimal dan tepat sasaran.

---

**Kata kunci:** PAD, DAU, DAK, belanja modal, PDRB, kemiskinan

## PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia (Suryawati, 2005). Salah satu daerah yang masih memiliki masalah dengan kemiskinan yaitu Provinsi Jambi.

**Tabel 1.** Garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Kerinci	356.059	17.000	7,13
Merangin	406.466	32.880	8,48
Sarolangun	424.223	25.390	8,45
Batang Hari	420.227	26.530	9,75
Muaro Jambi	375.372	16.860	3,83
Tanjung Jabung Timur	374.735	25.350	11,54
Tanjung Jabung Barat	364.012	35.120	10,56
Tebo	404.473	22.830	6,47
Bungo	390.439	20.870	5,60
Kota Jambi	488.034	48.950	8,12
Kota Sungai Penuh	373.673	2.550	2,81
<b>Provinsi Jambi</b>	<b>448.509</b>	<b>274.320</b>	<b>7,60</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2019

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa dari garis kemiskinan, Kota Jambi mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp 488.034/Kapita/Bulan. Dari jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jambi, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin terbesar terbanyak berada di Kota Jambi yaitu mencapai 48.950 orang. Hal ini bisa dipahami karena secara distribusi penduduk Provinsi Jambi, sebaran terbesar berada di Kota Jambi. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi sepanjang tahun 2013-2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi Tahun 2013-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)	Perkembangan (Persen)
2013	50.009	-
2014	50.950	1,85
2015	55.510	8,21
2016	51.610	-7,56
2017	52.008	0,77
2018	50.610	-2,76
2019	48.950	-3,39
2020	49.210	0,53
<b>Rata-rata</b>	<b>51.107</b>	<b>-0,34</b>

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Data pada Tabel 2. menerangkan bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013-2020, dengan nilai perkembangan jumlah penduduk miskin per-tahun sebesar -0,34 persen. Jumlah penduduk miskin

tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 55.510 orang, dengan nilai perkembangan sebesar 8,21 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 48.950 orang, dengan nilai perkembangan sebesar -3,39 persen. Namun, bila dilihat dari jumlah penduduk dari tahun 2013 hingga 2020, telah terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 799 orang, meskipun jumlah ini terbilang masih sedikit.

Merujuk pada data kemiskinan di Kota Jambi, merupakan satu tantangan bagi pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengupayakan pembangunan untuk tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya komitmen pemerintah untuk menaggulangi kemiskinan diharapkan jumlah penduduk miskin pada tahun-tahun berikutnya dapat terus menurun sejalan dengan kebijakan pemerintah dan komitmen untuk menurunkan penduduk miskin.

Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah (Setiawati, 2017). Menurut Myanti (2013) PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan cenderung akan menurun. Hasil penelitian Seruni (2014) dan Suidiana (2015) juga telah membuktikan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah. Di sisi lain, hasil penelitian Cholili (2014) dan Nabila (2015) menyatakan PDRB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat merangsang peningkatan disektor-sektor lain seperti; peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan rakyat. Untuk dapat benar-benar mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus menggunakan dana pengeluaran pemerintah dengan efektif dan efisien. Dana pengeluaran pemerintah daerah bersumber dari APBD, dimana pemerintah dapat menggunakan beberapa pos yang terdapat dalam APBD guna memaksimalkan pembangunan di Kota Jambi. Beberapa pos tersebut diantaranya adalah PAD, DAU, DAK, dan belanja modal (Siagian, 2018).

Perkembangan PAD, DAU, DAK di Kota Jambi tahun 2013-2020 berfluktuatif dari tahun ke tahun, PAD tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 403,48 miliar rupiah, sedangkan PAD terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 149,04 miliar rupiah. DAU tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 763,01 miliar rupiah, sedangkan DAU terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 430,38 miliar rupiah. DAK tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 335,09 miliar rupiah, sedangkan DAK terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 234,07 miliar rupiah. Belanja Modal tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 826,61 miliar rupiah, sedangkan Belanja Modal terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 285,39 miliar rupiah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin bisa daerah tersebut memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya meningkatkan PDRB. Hasil penelitian Hariyadi dan Yasa (2014) serta Ulfi dan Endrawati (2010) telah membuktikan bahwa PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan melihat hasil analisis elastisitas PAD terhadap PDRB. Di sisi lain, hasil penelitian Husna (2013) dan Siregar (2019) membuktikan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang direfleksikan dari PDRB daerah tersebut. Hasil penelitian Siagian (2018) membuktikan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Faktor lainnya yang diduga berpengaruh terhadap PDRB adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang. Semakin tinggi DAK yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian. Dengan semakin cepatnya kegiatan pembangunan karena adanya dukungan DAK, maka akan mendorong investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, yang kemudian diikuti dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian Putra (2016) membuktikan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sedangkan hasil penelitian Siagian (2018) membuktikan bahwa DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB.

Belanja modal juga merupakan faktor lainnya yang diduga dapat memengaruhi PDRB. Hal ini dikarenakan menurut Kuncoro (2010) menyatakan bahwa syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan investasi modal (belanja modal) pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDRB. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian Makrus (2017), Putra (2016), dan Siregar (2019) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sedangkan hasil penelitian Nurmainah (2013) dan Sanneng (2016) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rp (Rupiah) per kapita per bulan Disisi yang lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai tolok ukur definisi kemiskinan diterjemahkan sebagai kondisi kurang akibat kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah) selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak untuk seorang pekerja (Soesastro, 2005).

### **Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2012). Todaro, dkk (2006) mengatakan ada 3 (tiga) faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) akumulasi modal, (2) pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, dan (3) kemajuan teknologi.

### **Pendapatan asli daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2006).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Isdijoso, 2002).

### **Dana alokasi umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Halim, 2009). Dalam formulasinya, DAU didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal suatu daerah. Celah Fiskal adalah selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal, di mana dalam menghitung kebutuhan fiskal digunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Sebaliknya, Kapasitas Fiskal dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil. Formula perhitungan DAU untuk tingkat provinsi dan kota/kabupaten didasarkan pada faktor yang sama namun memiliki pembobotan yang berbeda (Tobing dan Brodjonegoro, 2013).

### **Dana alokasi khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Halim, 2014). DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk: (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh DAK adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

### **Belanja modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina dan Rasdianto, 2013). Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan (5) belanja modal fisik lainnya (Badrudin, 2017).

## **METODE**

### **Metode penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan PDRB, PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal di Kota Jambi periode 2000-2020. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kota Jambi periode 2000-2020, baik secara parsial maupun secara simultan, serta menganalisis hubungan PDRB terhadap kemiskinan di Kota Jambi periode 2000-2020.

### **Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat *time series* dalam kurun waktu 2000-2020, meliputi; (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), (4) Belanja Modal,

(5) kemiskinan, dan (6) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan. Data tersebut dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yang diperoleh dari empat instansi yaitu; BPS Provinsi Jambi, BPS Kota Jambi, BPKAD Kota Jambi, dan BPPRD Kota Jambi.

### **Analisis data**

Untuk menganalisis perkembangan PDRB, kemiskinan, PAD, DAU, DAK, dan belanja modal selama periode 2000-2020, digunakan teknik analisa deskriptif. Sementara untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja modal terhadap PDRB periode 2000-2020, digunakan teknik analisa kuantitatif dengan menggunakan alat analisis berupa regresi linier berganda. Teknik analisis kuantitatif juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini, yaitu bagaimana hubungan antara PDRB dengan kemiskinan di Kota Jambi periode 2000-2020. Adapun alat analisis yang digunakan adalah uji korelasi *karl person*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis perkembangan PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020**

Perkembangan PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan dalam kurun waktu 2000-2020, menunjukkan adanya fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan PDRB per-tahun sebesar 17,88 persen. Dari data tersebut diketahui bahwa Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 19.561 miliar rupiah, sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 1.971 miliar rupiah. Jika dilihat dari perkembangan PDRB, diketahui bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 254,98 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,28 persen.

Merujuk pada tingginya nilai perkembangan PDRB Kota Jambi pada Tahun 2013, adapun sektor yang memberikan kontribusi paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 3.318,51 miliar rupiah. Nilai PDRB untuk sektor ini mengalami peningkatan sebesar 2.384,25 miliar rupiah atau 255,20 persen dibandingkan pada tahun 2012 yaitu sebesar 934,26 miliar rupiah. Peningkatan ini didukung dengan adanya investasi penanaman modal asing untuk sektor perdagangan dan reparasi di tahun 2013 yaitu sebesar 2.595.000 US\$ dolar. Jumlah investasi tersebut mengalami peningkatan yaitu sebesar 2.438.800 US\$ dolar atau 1.571,39 persen.

### **Analisis perkembangan kemiskinan di Kota Jambi Periode 2000-2020**

Jumlah penduduk miskin di Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2000-2020, dengan nilai perkembangan jumlah penduduk miskin per-tahun sebesar 7,16 persen. Jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 55.510 orang, dengan nilai perkembangan sebesar 8,95 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebanyak 20.400 orang. Merujuk pada tingginya perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi pada tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2008 mencapai 8,79 persen atau meningkat sebesar 5,15 persen dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 yaitu 3,64%. Hasil penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) membuktikan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) membuktikan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Berkurangnya

tingkat kemiskinan karena IPM yang meningkat mengindikasikan bahwa IPM dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Berdasarkan data IPM Kota Jambi didapatkan nilai IPM pada tahun 2016 sebesar 76,14, nilai ini lebih besar dibandingkan nilai IPM pada tahun 2015 yaitu 75,58. Adanya peningkatan IPM pada tahun 2016 ternyata terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 7,03 persen.

Faktor lainnya yang diduga dapat menyebabkan kemiskinan adalah investasi disuatu daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan input suatu kegiatan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja. Investasi yang semakin tinggi maka akan semakin besar mempengaruhi rendahnya pengangguran, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian Endrayani dan Dewi (2016) membuktikan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan data terkait peningkatan investasi penanaman modal asing (PMA) pada sektor perdagangan dan reparasi pada tahun 2013, ternyata berdampak positif pada tingginya jumlah tenaga kerja pada sektor perdagangan dan reparasi, yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,83 persen.

### **Analisis perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jambi Periode 2000-2020**

Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2000-2020, dengan nilai perkembangan jumlah PAD per-tahun sebesar 17,96 persen. Jumlah PAD tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 403.484 miliar rupiah, sedangkan jumlah PAD terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 19.837 miliar rupiah. Jika dilihat dari perkembangan PAD, diketahui bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 52,68 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar -19,67 persen.

Merujuk pada tingginya nilai perkembangan PAD Kota Jambi pada Tahun 2014, adapun sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak daerah yaitu sebesar 128,82 miliar rupiah, dengan nilai kontribusi sebesar 52,28 persen. Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan sebesar 55,48 miliar rupiah atau 75,64 persen dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 73,34 miliar rupiah. Untuk realisasi penerimaan pajak daerah Kota Jambi tahun 2014, unsur atau komponen yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak penerangan jalan, dengan realisasi penerimaan sebesar 32,08 miliar atau 24,90 persen terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2014. Untuk realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2014, mengalami peningkatan sebesar 7,44 miliar rupiah atau 30,21 persen, dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 24,64 miliar rupiah.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2014 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jumlah kendaraan bermotor. Heriberta (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan jumlah dari kendaraan roda dua dan roda empat sebesar satu persen, akan mempengaruhi peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Kota Jambi sebesar 0,13 persen. Berdasarkan data pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi, didapatkan bahwa untuk kendaraan roda empat pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 9.369 unit atau 14,03 persen. Sementara untuk kendaraan roda dua pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 58.451 unit atau 12,23 persen.

Faktor berikutnya yang diduga menyebabkan terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2014 adalah jumlah pelanggan listrik. Mulyasa (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah pelanggan listrik

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan demikian semakin banyak jumlah pelanggan listrik, maka semakin besar tingkat konsumsi listrik, sehingga semakin besar pula jumlah realisasi penerimaan pajak penerangan jalan. Berdasarkan data jumlah pelanggan listrik Kota Jambi tahun 2014, diketahui jumlah pelanggan listrik sebanyak 406.973 pelanggan, dimana terjadi peningkatan sebesar 28,28%, dibandingkan jumlah pelanggan listrik tahun 2013 sebanyak 317.252. Di sisi lain, pada tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 4,98 miliar rupiah atau -19,67 persen dibandingkan PAD Kota Jambi pada tahun 2003 yaitu sebesar 25,29 miliar rupiah.

#### **Analisis perkembangan dana alokasi umum (DAU) Kota Jambi Periode 2000-2020**

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2000-2020, dengan nilai perkembangan DAU per-tahun sebesar 50,67 persen. Jumlah DAU tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 370.765 miliar rupiah, sedangkan jumlah DAU terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 35.549 miliar rupiah. Jika dilihat dari perkembangan DAU, diketahui bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 942,97 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar -55,66 persen.

Merujuk pada formulasi DAU, maka semakin besar PAD maka akan semakin besar pula kapasitas fiskal daerah, yang kemudian akan berdampak pada semakin menurunnya ketergantungan daerah terhadap transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nawatmi (2006) dalam penelitiannya bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bantuan pemerintah pusat, dimana semakin meningkat PAD maka semakin menurun tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, jika melihat pada kebutuhan fiskal yang diprosikan oleh jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia, maka diduga kelima unsur ini lah yang menjadi penyebab lebih tingginya kebutuhan fiskal dibandingkan kemampuan fiskal Kota Jambi pada tahun 2010. Selain itu, adanya tuntutan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, juga mendorong peningkatan DAU Kota Jambi pada tahun 2010. Hal ini dikarenakan DAU digunakan untuk membiayai pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik.

#### **Analisis perkembangan dana alokasi khusus (DAK) Kota Jambi Periode 2000-2020**

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2000-2020, dengan nilai perkembangan jumlah DAK per-tahun sebesar 38,85 persen. Jumlah DAK tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 335.099 miliar rupiah, sedangkan jumlah DAK terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 25.969 miliar rupiah. Jika dilihat dari perkembangan DAK, diketahui bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 727,27 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar -81,45 persen.

Tingginya perkembangan DAK Kota Jambi pada tahun 2013, diduga disebabkan oleh adanya peningkatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2013 pada sektor perdagangan dan reparasi, dimana terdapat tujuh proyek pembangunan di sektor tersebut pada tahun 2013. Sebagaimana, yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa DAK digunakan untuk membiayai belanja pembangunan pada sektor penting, dimana sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Jambi. Dengan adanya peningkatan investasi yang kemudian berdampak pada meningkatnya penyerapan



tenaga kerja di sektor tersebut, maka berdampak positif pada meningkatnya DAK Kota Jambi yang digunakan untuk membiayai belanja pembangunan di sektor tersebut.

### **Analisis perkembangan belanja modal Kota Jambi Periode 2000-2020**

Jumlah belanja modal Kota Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2000-2020, dengan nilai perkembangan jumlah belanja modal per-tahun sebesar 27,40 persen. Jumlah belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 826.61 miliar rupiah, sedangkan jumlah belanja modal terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 30.712 miliar rupiah. Jika dilihat dari perkembangan jumlah belanja modal, diketahui bahwa perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 189,43 persen, sedangkan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar -76,50 persen.

Tingginya peningkatan belanja modal pada tahun 2010, didukung dengan adanya peningkatan PAD, DAU, dan DAK Kota Jambi pada tahun 2010. Hasil penelitian Malau dan Pulungan (2019) membuktikan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Merujuk pada data perkembangan PAD menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PAD pada tahun 2010 sebesar 25.317 miliar rupiah atau 55,61 persen. Dengan adanya peningkatan PAD, maka semakin meningkat pula belanja modal yang dialokasikan untuk membiayai penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Untuk DAU mengalami peningkatan sebesar 343.640 miliar atau 966,67 persen pada tahun 2010. Sementara DAK mengalami peningkatan sebesar 2.869 miliar rupiah atau 9,77 persen. Dana transfer yang berupa Dana Perimbangan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi peran yang sangat penting untuk menjaga tercapainya standar pelayanan masyarakat di setiap daerah yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat produktif. Dengan demikian adanya peningkatan DAU dan DAK Kota Jambi pada tahun 2010, terbukti memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan belanja modal untuk membiayai pengadaan dan pembangunan fasilitas publik dan sektor penting lainnya.

Di sisi lain, penurunan belanja modal pada tahun 2009, juga diikuti dengan penurunan PAD, DAU, dan DAK pada tahun 2009. Untuk PAD pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 10.146 miliar rupiah atau 18,22 persen. Sementara DAU pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 335.216 miliar rupiah atau 90,41 persen. Begitupula dengan DAK yang juga mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 7.069 miliar rupiah atau 19,40 persen. Dari ketiga sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja modal, diketahui bahwa penurunan yang paling besar terdapat pada DAU. Dengan adanya penurunan ketiga sumber pendapatan daerah tersebut, ternyata memberikan dampak yang negatif terhadap alokasi belanja modal yang digunakan untuk membiayai pengadaan dan pembangunan fasilitas publik dan sektor penting lainnya di tahun 2009.

### **Uji koefisien regresi**

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien dari  $\beta_0$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , dan  $\beta_4$  dengan menggunakan analisis regresi berganda pada program SPSS 21, maka didapatkan model persamaan regresi berganda, yaitu  $Y = -288,946 + 0,689X_1 + 0,010X_2 + 0,333X_3 + 0,018X_4$ . Dari model persamaan regresi tersebut, berarti PDRB Kota Jambi (Y) akan mengalami kenaikan, bila PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan belanja modal (X4) ditingkatkan. Tetapi koefisien regresi untuk PAD (X1) = 0,689 paling tinggi daripada koefisien regresi DAU (0,010), DAK (0,333), dan belanja modal (0,018). Berdasarkan model persamaan regresi tersebut, maka didapatkan gambaran pengaruh variabel PAD

(X1), DAU (X2), DAK (X3), dan belanja modal (X4) terhadap PDRB Kota Jambi (Y) sebagai berikut:

Konstanta ( $a$ ) = -288,946, artinya jika variabel PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan belanja modal (X4) tidak ada, maka PDRB Kota Jambi (Y) akan menurun nilainya sebesar 288,946. Koefisien regresi X1 ( $\beta_1X_1$ ) = 0,689, artinya jika terjadi peningkatan PAD (X1) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kota Jambi (Y) sebesar 0,689 persen.

Koefisien regresi X2 ( $\beta_2X_2$ ) = 0,010, artinya jika terjadi peningkatan DAU (X2) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kota Jambi (Y) sebesar 0,010 persen. Koefisien regresi X3 ( $\beta_3X_3$ ) = 0,333, artinya jika terjadi peningkatan DAK (X3) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan PDRB Kota Jambi (Y) sebesar 0,333 persen. Koefisien regresi X4 ( $\beta_4X_4$ ) = 0,018, artinya jika terjadi peningkatan belanja modal (X4) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan PDRB Kota Jambi (Y) sebesar 0,018 persen.

### Uji koefisien determinasi ( $R^2$ )

Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) melalui program SPSS 21 didapatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,978. Hal ini berarti variasi naik turunnya variabel PDRB Kota Jambi mampu dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan belanja modal sebesar 97,8 persen, sementara sisanya sebesar 2,2 persen diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji asumsi klasik

Untuk mengetahui apakah model persamaan regresi berganda, yaitu  $Y = -288,946 + 0,689X_1 + 0,010X_2 + 0,333X_3 + 0,018X_4$  dapat dinyatakan sebagai model yang baik, maka model tersebut harus memenuhi kriteria BLUE (*best linear unbiased estimator*). Kriteria tersebut dapat dicapai bila model telah memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi; uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### Uji normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada pengujian normalitas data, peneliti menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21. Adapun pedoman dalam menentukan apakah data berdistribusi secara normal pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan melihat apakah nilai sig (signifikansi atau nilai probabilitas) lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,915, dimana  $0,915 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

### Uji autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada model regresi liner yang didapatkan. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel penjelas. Berdasarkan uji Run Test yang telah didapatkan dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21, didapat nilai probabilitas (sig) sebesar 0,182, dimana nilai ini  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala autokorelasi.

### Uji multikolinieritas

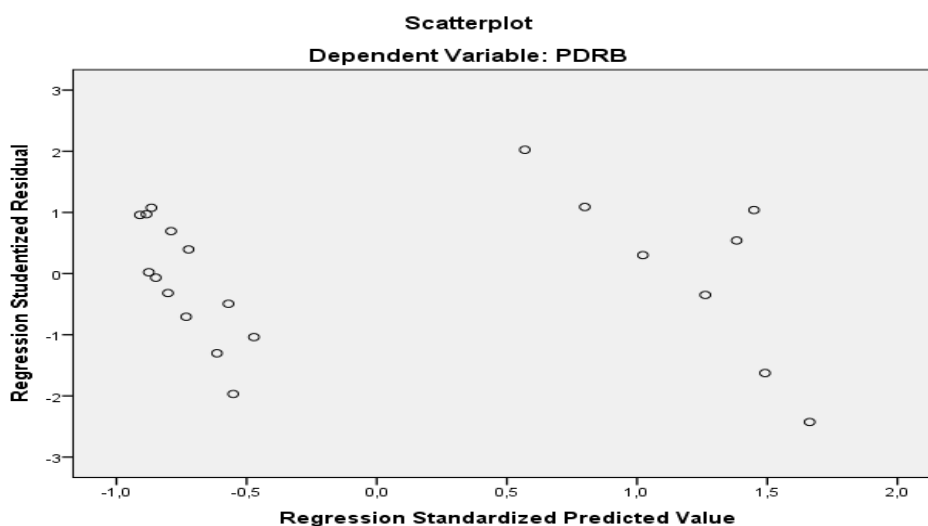
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pedoman dalam mendapatkan keputusan ada tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan menghitung nilai VIF dari setiap variabel independen. Bila

nilai VIF lebih besar dari 10 maka model regresi linier tersebut memiliki gejala multikolinieritas, sedangkan bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka model regresi linier tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai VIF dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21, didapatkan nilai VIF untuk setiap variabel yang diujikan, didapatkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan belanja modal memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang didapatkan tidak memiliki gejala multikolinieritas, artinya model regresi linier telah memenuhi persyaratan.

### Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap, maka model dinyatakan mengalami gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan uji scatterplot dengan alat bantu SPSS, untuk mengetahui apakah model mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa pada scatterplot titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil uji heteroskedastitas dengan metode scatterplot

### Uji hipotesis

#### Uji F statistik

Uji F dipergunakan untuk melihat apakah secara simultan variabel PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan belanja modal (X4) berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Jambi (Y). Berikut adalah tabel hasil analisis uji F:

Tabel 3. Hasil pengujian F statistik

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1028028081,598	4	257007020,399	220,020	<b>0,000<sup>b</sup></b>
	Residual	18689691,640	16	1168105,728		
	<b>Total</b>	<b>1046717773,238</b>	<b>20</b>			

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji F statistik dengan bantuan program analisis statistik SPSS 21, didapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) dari uji F (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis kelima, yang berarti secara bersama-sama (simultan) PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), dan belanja modal (X4) berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Jambi (Y).

#### Uji t statistik

Hasil uji t statistik melalui program SPSS 21 (Tabel 4.) didapatkan nilai signifikansi (sig) untuk variabel PAD (X1) sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel PAD (0,000) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis pertama bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB Kota Jambi (Y).

**Tabel 4.** Hasil pengujian t statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-288,946	481,169		-0,601	0,557
1 X1	0,035	0,005	0,689	7,597	0,000
X2	0,000	0,002	0,010	0,136	0,893
X3	0,021	0,003	0,333	6,150	0,000
X4	0,001	0,003	0,018	0,257	0,800

Sumber: Data diolah, 2023

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel DAU (X2) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,893. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel DAU (0,893) lebih besar dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menolak hipotesis kedua bahwa variabel DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel PDRB Kota Jambi (Y).

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel DAK (X3) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel DAK (0,000) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis ketiga bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB Kota Jambi (Y).

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel belanja modal (X4) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,800. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel belanja modal (0,800) lebih besar dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menolak hipotesis keempat bahwa variabel belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel PDRB Kota Jambi (Y).

#### **Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020**

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat merangsang peningkatan disektor-sektor lain seperti; peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan rakyat. Untuk dapat benar-benar mencapai hal tersebut, pemerintah daerah harus menggunakan dana pengeluaran pemerintah dengan efektif dan efisien. Dana pengeluaran pemerintah daerah bersumber dari APBD, pemerintah dapat menggunakan beberapa pos yang terdapat dalam APBD guna memaksimalkan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tersebut akan meningkatkan pelayanan publik yang kemudian dapat merangsang tingkat aktifitas perekonomian. Beberapa pos tersebut diantaranya adalah PAD, DAU dan DAK.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi

Pendapatan Asli Daerah, semakin bisa daerah tersebut memenuhi kebutuhan pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik sehingga produktifitas masyarakat dan investor meningkat yang selanjutnya meningkatkan PDRB.

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer yang signifikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana perimbangan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik agar peningkatan PDRB dapat terjadi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan PDRB antar daerah. Sementara Belanja modal merupakan proxy dalam APBD yang dianggap memiliki pengaruh penting terhadap nilai PDRB. Hal ini dikarenakan syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan investasi modal (belanja modal) pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDRB.

Berdasarkan hasil uji F diperoleh keterangan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi (sig) yang diperoleh yaitu 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil temuan ini menerangkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal dalam mempengaruhi PDRB Kota Jambi.

### **Pengaruh PAD terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020**

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat PDRB yang lebih baik (Siagian, 2018).

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi (sig) untuk variabel PAD (0,000) lebih kecil dari 0,05. Hasil temuan ini menerangkan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Jambi, diprediksikan akan memberikan dampak berupa kenaikan yang signifikan terhadap PDRB Kota Jambi. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian Rarung (2016) dan Untari (2017) yang membuktikan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB.

### **Pengaruh DAU terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan merupakan konsekuensi penyerahan kewenangan pusat terhadap daerah. Transfer ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberi

pelayanan publik yang lebih baik atau pelayanan lain. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya (Halim, 2009).

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU). Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena sudah ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga hal tersebut akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang direfleksikan dari PDRB daerah tersebut (Siagian, 2018).

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi (sig) untuk variabel DAU (0,893) lebih besar dari 0,05. Hasil temuan ini menerangkan bahwa semakin tinggi DAU yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Jambi, tidak akan memberikan dampak berupa kenaikan yang signifikan terhadap PDRB Kota Jambi.

#### **Pengaruh DAK terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Menurut UU no. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.

DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengalokasian DAK kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian dan percepatan pembangunan yang kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah (Putra, 2016).

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi (sig) untuk variabel DAK (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dari hasil perhitungan koefisien regresi didapatkan nilai yang positif, yang berarti bahwa semakin tinggi DAK yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Jambi, diprediksikan dapat meningkatkan PDRB Kota Jambi secara signifikan. Hasil temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ardiyanti, dkk (2019) yang membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Namun, di sisi lain hasil penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Murni (2009), Permatasari (2013), Putra (2016), dan Siagian (2018) yang membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB.

#### **Pengaruh belanja modal terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020**

Berdasarkan ruang lingkup ekonomi publik, belanja modal merupakan proxy dalam APBD yang dianggap memiliki pengaruh penting terhadap nilai PDRB. Sesuai dengan teori Harrod-Domar yang menyatakan syarat untuk mencapai kondisi ekonomi yang

mantab dengan pembentukan modal dalam negara yang bersangkutan. Belanja modal adalah bagian dari belanja langsung daerah yang digunakan untuk belanja barang dan jasa yang dapat menambah aset tetap atau kekayaan daerah yang manfaatnya melebihi satu periode anggaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Potensi belanja modal dalam peranannya untuk meningkatkan pelayanan publik seharusnya menjadi alasan pemerintah daerah untuk menstruktur ulang anggaran belanja daerah, yaitu memperbanyak proporsi belanja modal dibanding belanja rutin (Danar, 2016).

Todaro dan Smith (2006) mengemukakan bahwa ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu: (1) akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja (2) Pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja (3) Kemajuan teknologi, yang secara luas, diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. Akumulasi modal merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi, seperti investasi pemerintah berupa investasi produktif yang memungkinkan untuk meningkatkan tingkat output, seperti penyediaan infrastruktur sosial maupun ekonomi. Infrastruktur sosial meliputi pendidikan melalui fasilitas sekolah; kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; perumahan dan tempat rekreasi. Infrastruktur ekonomi merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi meliputi publik *utilities* (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi dan gas) dan sektor transportasi (jalan, rel kereta api, pelabuhan, lapangan terbang). Kuncoro (2010) menyatakan bahwa syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan investasi modal (belanja modal) pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDRB. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi (sig) untuk variabel belanja modal (0,697) lebih besar dari 0,05. Hasil temuan ini menerangkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi, tidak akan memberikan dampak berupa kenaikan yang signifikan terhadap PDRB Kota Jambi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmainah (2013) dan Sanneng (2016) yang membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB.

### Analisis Hubungan PDRB dengan Kemiskinan di Kota Jambi Periode 2000-2020

Hasil analisis korelasi Karl Person dengan bantuan program SPSS, didapatkan hasil hubungan antara variabel PDRB Kota Jambi dengan variabel kemiskinan sebagai berikut:

**Tabel 5.** Hasil analisis korelasi PDRB Kota Jambi dengan Kemiskinan

		LG_PDRB	LG_Kemiskinan
LG_PDRB	Pearson Correlation	1	0,701**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	21	21
LG_Kemiskinan	Pearson Correlation	0,701**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	21	21

Sumber: Data diolah, 2023

Data hasil uji korelasi pada tabel di atas menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,701, yang berarti tingkat keeratan hubungan antara variabel PDRB Kota Jambi dengan variabel kemiskinan berada pada kategori “kuat”. Dari hasil ini juga didapatkan

nilai signifikansi (Sig) sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis keenam, yang berarti variabel PDRB Kota Jambi memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2003). Menurut Kuncoro (2000) pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Menurut penelitian Hermanto S. dan Dwi W. (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Wongdesmiwati (2009) menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti investasi melalui penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh swasta dan pemerintah, perkembangan teknologi yang semakin inovatif dan produktif, serta pertumbuhan penduduk melalui peningkatan modal manusia.

Sudiana (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dimana PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah. Gejala pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu PDRB karena PDRB menggambarkan aktivitas perekonomian yang dapat dicapai pada satu periode (Wijayanti, 2014). Menurut Myanti (2013) PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan cenderung akan menurun.

Berdasarkan hasil analisis korelasi (Tabel 5.) didapatkan bahwa variabel PDRB Kota Jambi memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel kemiskinan. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seruni (2014), Sudiana (2015), dan Dama, dkk (2016) yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pendataan PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, PDRB, dan Kemiskinan di Kota Jambi selama kurun waktu 2000-2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Rata-rata perkembangan PAD Kota Jambi per-tahun adalah sebesar



17,96 persen. Rata-rata perkembangan DAU Kota Jambi per-tahun adalah sebesar 50,67 persen. Rata-rata perkembangan DAK Kota Jambi per-tahun adalah sebesar 38,85 persen. Rata-rata perkembangan Belanja Modal Kota Jambi per-tahun adalah sebesar 27,40 persen. Rata-rata perkembangan PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 4,22 persen per-tahun dan rata-rata perkembangan PDRB Per Kapita Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per-tahun adalah sebesar 17,88 persen. Rata-rata perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi per-tahun adalah sebesar 7,16 persen.

PAD, dan DAK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020. Sedangkan DAU dan belanja modal secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020. Untuk pengaruh secara simultan, PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota Jambi Periode 2000-2020. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang signifikan dengan kemiskinan di Kota Jambi Periode 2000-2020.

### **Saran**

Dari hasil perhitungan koefisien regresi diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi pengaruh yang paling tinggi terhadap PDRB Kota Jambi. Dengan demikian, untuk meningkatkan PDRB pada periode berikutnya, maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada pajak daerah karena kontribusinya yang paling besar bagi PAD. Untuk itu, perlu dilakukan upaya baik itu berupa kebijakan maupun strategi yang dapat diterapkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bisa menjadi daerah yang mandiri dan secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat.

Dari hasil perhitungan koefisien regresi diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi pengaruh yang paling rendah terhadap PDRB Kota Jambi. Dengan demikian, pemerintah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum (DAU) agar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan terutama di bidang ekonomi melalui penggunaan DAU semakin meningkat, sehingga PDRB setiap periodenya bisa meningkat.

Bagi peneliti selanjutnya agar mengambil populasi Kota atau Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jambi, dan menambah variabel penelitian yang lebih lengkap dan bervariasi. Penambahan variabel independen lain, baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi, dan lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiyanti, R., Eko Jokolelono, dan Yunus Sading. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2010-2016. *Katalogis*, Vol. 7 (1):72-83
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2020). *Kota Jambi dalam Angka 2020*. Jambi: BPS Kota Jambi
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Cholili, Fatkhul Mufid. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 2(1), 1-14

- Dama, H.Y., Agnes L Ch Lopian, dan Jacline I. Sumual. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 (3):549-561
- Daniar, E. (2016). *Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya
- Endrayani, Ni Ketut Ani dan Dewi, Made Heny Urmila. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5 (1):63-88
- Erlina, R. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian
- Halim, A. (2009). *Akuntansi sector Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat
- Hariyadi, E., dan Yasa, I Nyoman Mahendra. (2014). Pengaruh PAD terhadap PDRB dan Belanja Modal Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3 (12):586-593
- Heriberta. (2012). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Jambi 2001-2009. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 1 (5):49-55
- Hermanto, S. dan Dwi, W. (2008). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Artikel Penelitian. Institut Pertanian Bogor
- Husna, A. dan Sofia, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. *JEMI*, 4 (2)
- Irdijoso, Brahmantio (2002). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di kota Surakarta). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6 (1).
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Makrus, M. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Implikasinya Pada Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *JEM: Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 1 (1):111-124
- Malau, Y.N. dan Pulungan, D.A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis*, Vol. 4 (2):35-42
- Mardiasmo (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1)
- Mulyasa, R. (2018). Pengaruh Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Serang. Publikasi Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
- Myanti Astrini A. Ni Made. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(8), 384-392
- Murni, E. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatra Barat*. Naskah Publikasi, Program Studi Akuntansi Pemerintahan, Politeknik Universitas Andalas, Padang
- Nabila, Hana Ainin. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat

- Kemiskinan (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 3(2)
- Nawatmi, S. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat di Lima Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 13 (2):222-236
- Nurmainah, S. (2013). *Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi, Fakultas ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang
- Permatasari, W.A. (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)*. Artikel Penelitian. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Prasetyoningrum, A.K. dan Sukmawati, U.S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 (2):217-240
- Putra, D.D. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan
- Rarung, P. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 (3):449-460
- Sanneng, P. (2016). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Penanaman Modal dalam Negeri terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan*. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar
- Seruni, P. (2014). Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Pendidikan, dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10), 431-484
- Setiawati, I. (2017). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang*. Artikel Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Siagian, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Siregar, Bintang Tri Putri. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kota Pematangsiantar*. Naskah Publikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan
- Soesastro, H., Aida Budiman, dkk. (2005) . *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi dalam Setengah Abad Terakhir ke 2*. Yogyakarta: Kanisuis
- Sudiana, I Wayan. (2015). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Struktur Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(6), 608-745.
- Sukirno, Sadono (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Tambunan. (2003). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*. Naskah Publikasi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Tobing, M. Syareja L. dan Bambang P.S. Brodjonegoro. (2013). Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol. 13 (2):143-158
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga
- Ulfi, Maryati Dan Endrawati. (2010). Politeknik Negeri Padang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5 (2): 68-84
- Untari. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten) Provinsi Jawa Tengah*. Publikasi Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijayanti, D. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2008-2013). *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(3), 1164-1193
- Wongdesmiwati, 2009. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika. Artikel [Online]. Diakses 28 Mei 2021, dari: [http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-\\_analisis-ekonometri\\_.pdf](http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometri_.pdf)